

**PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS
KOPERASI DAN UMKM KOTA SUNGAI PENUH**

**DEDE DWI PUTRA, NANIK MANDASARI, FLORA LIDIA SANDI
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email :

dededwiputra0396@gmail.com

mandasarinanik@gmail.com

floolidia@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of difficult business actors in doing marketing and product promotion widely, many UMKM do not have business licenses, there are still many UMKM that have not been recorded, the number of UMKM is increasingly unable to grow and develop. The purpose of this research is to provide Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Development during the Covid-19 Pandemic in Sungai Penuh City. This research uses a qualitative method. The research data obtained are primary data and secondary data by using various literatures such as books, articles and journals to access data related to UMKM development during the COVID-19 pandemic. It can be said that the UMKM of Sungai Penuh City are not yet effective in accordance with the indicators used in this study, namely 1). Targeting, 2). Program socialization, 3). Program Objectives, 4). Program Monitoring. These four indicators have not been fully achieved so that they have an impact on the development of UMKM in Sungai Penuh City. In this coaching activity the Cooperatives and UMKM Service in Sungai Full City cannot do many things in other words, it has limitations in breaches or funds because funds are diverted for Covid-19 and the absence of facilities and infrastructure assistance provided to UMKM in Sungai Penuh City. It is also important in carrying out the development of UMKM to involve bureaucratic leaders both in the District and in the City so that this program can later run more effectively and usefully. In addition, in the implementation of this development, collaboration is also very much needed both with the private sector and SOEs as well as involving CSR (Corporate Social Responsibility) to maximize the development of UMKM in the development of the River City as well as sustainable development activities for UMKM.

Keywords: Coaching, Covid-19 Pandemic, UMKM, Facilities and Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang pelaku usaha sulit dalam melakukan pemasaran dan promosi produk secara luas, banyak UMKM yang belum memiliki surat izin usaha, masih banyak UMKM yang belum terdata, jumlah UMKM yang semakin banyak tidak mampu tumbuh dan berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku-buku, artikel serta jurnal untuk mengakses data yang berkaitan dengan pembinaan UMKM pada masa pandemi covid-19. Teknik analisis dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh dapat dikatakan belum efektif sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1). Ketepatan sasaran, 2). Sosialisasi Program, 3). Tujuan Program, 4). Pemantauan Program. Keempat indikator ini belum sepenuhnya tercapai sehingga berdampak pada pembinaan UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan pembinaan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh tidak dapat melakukan banyak hal dengan kata lain memiliki keterbatasan dalam hal anggaran atau dana karena dana dialihkan untuk Covid-19 serta tidak adanya bantuan fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan kepada UMKM Kota Sungai Penuh. Penting juga dalam melaksanakan Pembinaan UMKM untuk melibatkan pemangku birokrasi baik di Kecamatan maupun di Kota sehingga program ini nantinya dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat. Selain itu dalam pelaksanaannya pembinaan ini juga sangat diperlukan kolaborasi baik kepada pihak swasta maupun BUMN serta melibatkan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar, serta dalam kegiatan Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh perlu melakukan pengecekan berkala agar pembinaan terhadap UMKM menjadi maksimal.

Kata Kunci : Pembinaan, Pandemi Covid-19, UMKM, Sarana dan Prasarana

I. PENDAHULUAN

Covid-19 memberikan implikasi terhadap ekonomi, sosial dan politik hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Sektor yang terkena dampak selama Pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya. (Susilawati & Purwoko, A, 2020)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perdagangan di Indonesia. Karena dengan UMKM ini, pengangguran akibat angkatan kerjaya tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UMKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Sektor UMKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Menurut Mudradjad Kuncoro (2008) UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena tidak memiliki utang luar negeri.

Sejak Pandemi Covid-19 daya beli masyarakat sangat rendah, selain dikarenakan tidak bisa memiliki banyak kesempatan untuk bergerak, masyarakat juga memiliki keterbatasan dana untuk dibelanjakan. Rendahnya permintaan ini kemudian menyebabkan munculnya deflasi atau penurunan harga-harga barang di pasar. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil survey yang dilakukan, Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan UMKM dan tercatat sebanyak 47% UMKM harus gulung tikar karena dampak Pandemi Covid-19. (Sumber Kemenkopukm)

Saat ini dengan perkembangan penduduk Kota Sungai Penuh dari Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebanyak 97.190 Jiwa. Jumlah ini menjadi potensi tersendiri dalam UMKM untuk tumbuh dan berkembang, disamping itu juga dengan perkembangan penduduknya menjadikan banyak UMKM baru yang tumbuh. Dengan perkembangan yang semakin maju seharusnya perkembangan UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh juga harus maju walaupun kenyataannya tidak sesuai. Persoalan yang muncul di lapangan, UMKM yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu tumbuh dan berkembang sesuai harapan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor penyebab kondisi seperti kendala mengenai pengetahuan yang dimiliki pengelola usaha, juga berkenaan dengan kemampuannya mengelola usaha dan juga penerapan teknologi yang berkembang saat ini dan juga faktor lainnya.

Pembinaan UMKM di Kota Sungai Penuh merupakan wewenang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, mengingat bahwa kondisi UMKM di Kota Sungai Penuh tidak semuanya dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik karena terdampak Pandemi Covid-19. Selain itu jumlah UMKM yang banyak belum mampu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, saat ini UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh dalam kondisi yang memprihatinkan, banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet dan banyak usaha-usaha kecil yang menutup usahanya pada masa Pandemi Covid-19, dimana sebagai organisasi yang mendukung perekonomian masyarakat perannya sangat dibutuhkan.

Adanya pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh akan memberikan pengetahuan secara luas dan secara langsung melatih pelaku UMKM agar lebih kompeten dan mampu memunculkan inovasi-inovasi baru dalam mendirikan usaha. UMKM memiliki peran yang sangat penting, karena sebagian penduduknya masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha makro dan kecil baik di sektor tradisional maupun internasional. Pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh berupaya untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bahan untuk menyusun skripsi

dengan judul **“PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SUNGAI PENUH”**

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan Deirdre D. Johnston and Scoot W Vanderstoep, pendekatan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sementara pendekatan kuantitatif merupakan pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

III. METODE PENELITIAN

Kota Sungai Penuh merupakan Kota Madya terbesar kedua di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Penduduk Kota Sungai Penuh berjumlah 97.190 jiwa, dengan kepadatan 248 jiwa/km. Mata pencaharian penduduk Kota Sungai Penuh adalah pedagang. Oleh karena itu, banyak sekali pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memilih lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh dan lebih spesifiknya di tempat usaha pelaku UMKM Kota Sungai Penuh yang merupakan tempat usaha para pelaku UMKM. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. (Afifudin,2012) Sumber yang diwawancarai adalah Pihak Dinas Koperasi dan UMKM dan para pelaku UMKM.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala

dalam objek penelitian. (Ibid hlm 134) observasi ini nantinya akan dilihat saat pembinaan kepada perilaku UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman atau kejadian yang ditulis atau dicetak dapat berupa cetakan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Beberapa dokumen yang dijadikan sumber data didapatkan dari dokumen-dokumen milik Dinas Koperasi dan UMKM, diantaranya data Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Sungai Penuh.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan cara : (Ali Sya'ban 2005)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian. Seperti, hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan di kumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisan dan penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

IV. PEMBAHASAN

Konsep Pembinaan

Menurut Thoha, 2020 Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan adalah pemberian fasilitas dan pendampingan dalam proses pengembangan. Pengembangan yang dimaksudkan adalah pengembangan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM,

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1998 yang mana pembinaan dan pengembangan UMKM yang mandiri sehingga usaha tersebut dapat berkembang.

Menurut Widjaja dalam (Deswandi, 2016) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan dan akhirnya mengembangkan. Dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, kordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan sekala berdayaguna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, menyiapkan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM, melaksanakan program pembinaan yang telah disiapkan dan mengawasi kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan UMKM tersebut. Dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan UMKM adanya ruang lingkup pembinaan meliputi, bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengembangan atau pembinaan organisasi umumnya berfokus pada peningkatan dinamika internal organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Konsep dan instrument dari pembinaan organisasi ini dapat digunakan untuk tujuan memecahkan masalah sosial dan katalisator perubahan sosial yang konstruktif.

Tujuan Pembinaan

Menurut (Thoha, 2020) untuk mnegetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga, ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (power with in), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power within).

Melihat dari kelemahan-kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen serta menyeluruh, mulai dari proses produksi, hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar instansi. Menurut (Thoha, 2020) tujuan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain adalah :

1. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar
2. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen

4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi

Sejalan dengan itu, konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dalam aktivitas pembinaan menurut (Rimawati, 2010) terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya, yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul)
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka
3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka

Prinsip Pembinaan

Menurut (Thoha, 2020) prinsip pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif, ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach)
2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system strategy) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi.

Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell dalam Miftah Thoha mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu sebagai berikut :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “action research”
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/ perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil maupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat sebagai usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki peran sangat penting bagi negara baik dalam sistem perekonomian, bagi masyarakat maupun untuk meningkatkan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, UMKM dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Livelihood Activities

UMKM yang termasuk kedalam kegiatan ini umumnya bertujuan untuk mencari nafkah. Para pelaku usaha di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.

Contohnya : Pedagang Kaki Lima

2. Micro Enterprises

UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Jumlah UMKM ini di Indonesia biasanya berjumlah relatif besar.

3. Small Dynamic Enterprises

Pada UMKM jenis ini biasanya memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dibina dengan baik, sebagian UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah

kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah UMKM pada kategori I dan II. Kelompok UMKM ini sudah dapat menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor

4. *Fast Moving Enterprises*

Pelaku UMKM jenis ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya jauh lebih sedikit dari UMKM pada kategori I dan II.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 2008 (Indonesia,2008) adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Kriteria yang termasuk dalam UMKM adalah usaha mikro yang merupakan suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset usaha bersih kurang lebih 50 juta perbulan. Usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk kedalam kalkulasi.

Contoh : warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, warung nasi dll.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha dari sebuah kriteria dari sebuah badan usaha UMKM yang mana usaha ini dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan Usaha Kecil berada di bawah 300 juta per tahun yang merupakan kekayaan bersih yang sudah di kalkulasi secara sempurna.

Contoh : Industri Kecil, Koperasi, Mini Market, Toserba, dll

3. Usaha Menengah

Sebuah badan usaha bisa dikatakan Usaha Menengah apabila laba bersih atau kekayaan bersih dari perusahaan mencapai 500 juta perbulan, namun kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha didalam jenis ini tidak dimasukkan dalam kalkulasi.

Contoh : Usaha Perkebunan, Perdagangan Ekspor Impor, Ekspedisi Muatan Laut dll

Ciri dan Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut (Koerniawati,2009) Usaha Mikro dicirikan oleh berbagai kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap dan tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat, SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
2. Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, serta tingkat pendidikan rata-rata relatif lebih rendah.
3. Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank dan tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan menurut (Koerniawati, 2009) Usaha Kecil dicirikan sebagai berikut :

1. Jenis usaha atau barang komoditas yang diusahakan umumnya tidak mudah berubah, lokasi usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
2. Pada umumnya, sudah melakukan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha dan sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas termasuk NPWP serta SDM yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
3. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan dalam hal keperluan modal dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti *business planning*.

Menurut (Koerniawati,2009) secara umum ciri-ciri Usaha Menengah meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang sudah jelas dan telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur.
2. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, sudah menyediakan Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya.
3. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.
4. Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan dan umumnya sudah memiliki SDM yang terlatih dan terdidik.

Kelebihan UMKM :

UMKM memiliki kemampuan potensial yang menjadi andalan sebagai basis pengembangan pada masa yang akan datang. Berikut ini merupakan potensial UMKM menurut (Putri,2019) :

1. Sarana Memeratakan Tingkat Perekonomian
UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. Bahkan, UMKM menjangkau daerah pelosok.
2. Sarana Mengetaskan Kemiskinan
UMKM berperan untuk mengetaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.
3. Sarana Pemasukan Devisa bagi Negara
UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan internasional.

Kelemahan UMKM :

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan UMKM pada umumnya berkaitan dengan faktor intern dari UMKM itu sendiri. Kelemahan dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, hutang yang tidak bermanfaat, tidak memenuhi ketentuan pembukuan standard.

2. Pembagian kerja yang tidak proposional dan karyawan sering bekerja diluar batas jam kerja standard.
3. Tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja, karena tidak ada perencanaan kas.
4. Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
5. Sering terjadi mist-manajemen dan ketidak pedulian pengelolaan terhadap prinsip manajerial.
6. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
7. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah dirumuskan.

Sedangkan, faktor eksternnya meliputi :

1. Resiko dan hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
2. Setiap kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
3. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.

OPERASIONAL KONSEP

Menurut (Singarimbun,2006) definisi konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variable-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.2 Operasional Konsep

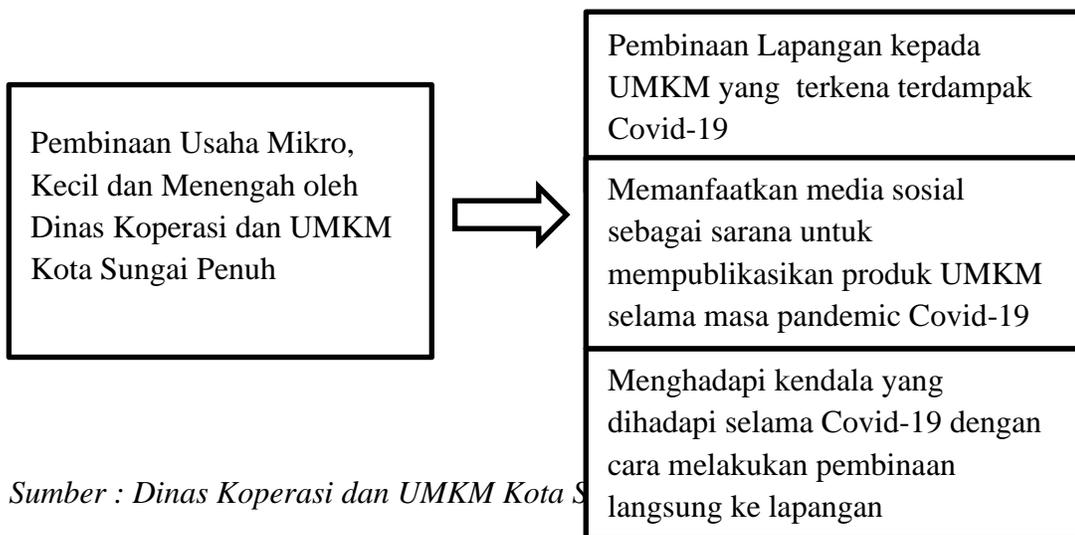
Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pembinaan UMKM	1. Ketetapan Pembinaan	1. UMKM yang mendapatkan pembinaan merupakan UMKM telah memiliki iin usaha 2. Pembinaan diberikan kepada UMKM yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah 3. Pembinaan diberikan kepada UMKM yang terdampak Covid-19
	2. Sosialisasi Pembinaan	1. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan kunjungan sosialisai terkait dengan program pembinaan UMKM 2. Memberikan pemahaman pentingnya pembinaan UMKM 3. Sosialisasi menggunakan media digital

	3. Tujuan Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya tahan UMKM 2. Meningkatkan akses pasar 3. Menciptakan UMKM yang tangguh 4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi
	4. Pemantauan Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemantauan kepada pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan 2. Evaluasi perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembinaan 3. Pengecekan berkala pada pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan

Sumber : Budiani (2007)

KERANGKA BERFIKIR

Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah penelitian, berikut dikemukakan kerangka pikir (alur pikir) dari penelitian seperti skema berikut :



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota S

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi serta beberapa metode penelitian yang dilakukan dan uraian dari beberapa bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Sungai Penuh berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada usaha kecil. Bahwa dari pelaku usaha kecil benar-benar mengalami dampak langsung akibat adanya pandemi Covid-19. Pelaku usaha kecil merasakan kurangnya daya beli masyarakat serta penurunan omset penjualan dikarenakan pendapatan berkurang disebabkan oleh sepi pembeli atau daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi ini pelaku usaha kecil sangat memerlukan pembinaan agar bisa memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi sehingga usaha yang dijalankan mampu bertahan di kondisi pandemic Covid-19 seperti sekarang ini. Namun, dikarenakan pandemi Covid-19 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh belum bisa untuk terjun kelapangan langsung untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
2. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan bisnisnya yaitu para pelaku usaha perlu meningkatkan kreatifitas dalam memasarkan barang yang mereka jual, mempromosikan barang mereka melalui pemasaran secara online atau media sosial, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, dan menambahkan inovasi pada usaha mereka antara lain menambah varian baru produk yang dijual. Serta pelaku UMKM dapat memberikan diskon atau memberikan harga yang lebih murah dari biasanya untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh dengan pelaku UMKM Kota Sungai Penuh sangat diperlukan. Untuk itu pembinaan UMKM pun sangat diperlukan oleh pelaku UMKM itu sendiri selain untuk menaikkan omset juga untuk mempertahankan usaha mereka.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal ini. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ace, Partadiretja. 1985. Pengantar Ekowisata. Yogyakarta : BPFE.

- Adi, Prasetyo. 2008. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Kaffah Yogyakarta”, Surakarta. *Skripsi FE STAIN*.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiani, N. W. 2007. Efektivitas Program Penganggulan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. 53
- Deswandi. D. 2016. Tugas Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.1538
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.jr. 1984. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Kamus Lengkap Ekonomi tahun 2002.
- Koerniawati, T. 2009. *Memahami Konsep Operasional UMKM*. Surabaya : Lecture Brawijaya.
- Kotler, Philip. 2008. *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*. Jakarta: Indeks.
- Miftah.Toha. 2007. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Rimawati, R. 2010. Dampak Pembinaan dan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah. *Penelitian Jurnal*, 25.
- Peraturan Menteri Perekonomian nomor 98 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
- Singarimbun, S.E. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. 2020. Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budafest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156.
- Indonesia, R. 2008. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Undang-undang No 20 Tahun 2008